



**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Angrum Pratiwi, Darmawati, Rizky Amaliyah

Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia

Email: angrumpratiwi89@gmail.com, darmawati3@yahoo.com,

rzkyamaliyh@gmail.com

Abstract: The implementation of Good Corporate Governance (GCG) should be implemented properly, in order to create a healthy banking according to sharia principles. An important part of the governance structure of the Bank is the board of commissioners, directors, and the sharia supervisory board. This study analyzes the effect of GCG disclosure consisting of the board of commissioners, board of directors and sharia supervisory board on Islamic social reporting in Islamic commercial banks in Indonesia. This type of research is associative quantitative. The research sample consisted of seven Islamic commercial banks in Indonesia, with an observation period of 2014-2019. The data source comes from the annual report and GCG report of each Islamic commercial bank. Disclosure of ISR is carried out by means of a dichotomy, namely "1" if the report is disclosed and "0" if not disclosed. Data analysis using multiple linear regression. Hypothesis testing using the t test, F test, and R Square. The results showed that the variable size of the board of commissioners had no effect on the ISR disclosure. Meanwhile, the variable size of the board of directors and sharia supervisory board affects the ISR disclosure. The quality and competence of the board of directors and the sharia supervisory board determine Islamic banks in implementing good corporate governance.

Keywords: good corporate governance, islamic social reporting, board of commissioners, board of directors and sharia supervisory board.

Abstrak: Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah semestinya diterapkan dengan baik, agar terwujudnya perbankan yang sehat sesuai prinsip syariah. Bagian penting dalam struktur tata kelola Bank adalah komisaris, direksi, serta dewan pengawas syariah. Penelitian ini menganalisa pengaruh pengungkapan GCG yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Jenis penelitian adalah kuantitatif asosiatif. Sampel penelitian berjumlah tujuh bank umum syariah di Indonesia, dengan periode pengamatan 2014-2019. Sumber data berasal dari *annual report* dan laporan GCG masing-masing bank umum syariah. Pengungkapan ISR dilakukan dengan cara dikotomi, yaitu “1” apabila laporan tersebut diungkapkan dan “0” apabila tidak diungkapkan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan R Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan, variabel ukuran dewan direksi dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kualitas dan kompetensi dewan direksi serta dewan pengawas syariah menentukan bank syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kata kunci: good corporate governance, islamic social reporting, dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah.

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengontrol serta melancarkan hubungan antar pihak yang saling berkepentingan untuk menciptakan nilai tambah bagi

perusahaan (Tapanjeh, 2009). Tata kelola perusahaan yang baik direkomendasikan dan penting diterapkan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih efisien (Klapper & Love, 2004). Sebagai salah satu pondasi perusahaan dalam mencapai visi dan misinya, serta berdampak bagi perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang (Charles & Chariri, 2012).

Dalam *good corporate governance* (GCG) pengelolaan perusahaan dilakukan secara hati-hati sesuai dengan etika dan transparansi serta akuntabilitas tinggi (Tangkilisan, 2003). Prinsip dasar dalam GCG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran (Sutedi, 2011). Lima prinsip ini mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan baik *shareholder* maupun *stakeholders* (Sudaryati & Eskadewi, 2012). GCG sendiri telah diterapkan oleh bank syariah di Indonesia melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar penentuan tingkat kesehatan bagi bank umum syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah komisaris, direksi, komite, dewan pengawas syariah, dan satuan kerja pada bank umum syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Tanggungjawab sosial perusahaan tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, namun perusahaan harus memiliki tanggungjawab kepada sosial dan lingkungan (Nurkhin, 2010). Tanggung jawab sosial perusahaan dianggap inti dari etika bisnis perusahaan yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan (Fauziah & Yudho J., 2013). Dalam Undang-Undang No. 40 Perseroan Terbatas tahun 2007, bagian kedua pasal 66 nomor 6

disebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan melaporkannya dalam laporan tahunan perusahaan (UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, 2007).

Prinsip syariah dalam tanggungjawab sosial perusahaan menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang umum digunakan bagi institusi keuangan syariah (Othman & Thani, 2010). Indeks ISR berisi item-item standard tanggungjawab sosial perusahaan yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (Othman et al., 2009). Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang sesuai dengan perspektif Islam (Lestari, 2013).

Penerapan *good corporate governance* (GCG) menggunakan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan dewan pengawas syariah sebagai variabel independen (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum kegiatan perusahaan (UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, 2007), hal ini tentunya berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Khoirudin, 2013) (Sudana & Arlindania W, 2011). Dewan direksi bertugas dan bertanggungjawab penuh kegiatan bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014b), termasuk didalamnya kepatuhan akan undang-undang dan prinsip syariah (Harahap et al., 2017). Tugas dan tanggungjawab direksi berdampak terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah (Sofyani et al., 2012) (Lestari, 2013). Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (UU No. 21 Perbankan Syariah, 2008). Transparansi kinerja DPS dalam laporan

tahunan bank syariah menunjukkan apakah bank telah memenuhi prinsip syariah atau tidak (Maali et al., 2006).

Dengan demikian, berdasarkan kajian teori dan literatur yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* Melalui Pendekatan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah”. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan ukuran dewan komisaris, ukuran direksi dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah bentuk *self regulation* dalam perusahaan, bertujuan untuk meningkatkan *shareholders value*. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan bagi seluruh *stakeholder* (Djumhana, 2008). GCG bagi bank adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *indepedency*, dan *fairness* (Bank Indonesia, 2009). *Governance structure* pada Bank Umum Syariah (BUS) terdiri dari Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UU No. 21 Perbankan Syariah, 2008). Anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (Rivandi & Marlina, 2019). Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan nasihat. Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (Zarkasyi, 2008).

Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan (Bank Indonesia, 2009). Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan (Tangkilisan, 2003).

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (UU No. 21 Perbankan Syariah, 2008) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan (Charles & Chariri, 2012). DPS melakukan

pengawasan terhadap *shariah compliance* pada bank syariah, sehingga aktivitas dan kegiatan bank tidak keluar dari aspek syariah (Tapanjeh, 2009).

Islamic Social Reporting

Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah indeks yang berisi item-item standard tanggungjawab sosial yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti. Terdapat enam (6) item yang diungkap dalam indeks ISR yaitu *Finance and Investment, Products/Services, Employee, Society, Environment, dan Corporate Governance* (Othman et al., 2009) (Othman & Thani, 2010) (Lestari, 2013).

Indeks ISR dalam penelitian ini menggunakan *corporate governance theme*, yaitu terdiri dari lima (5) indikator pengungkapan, yaitu: *Shariah compliance status, Ownership structure, BOD Structure Members, Declaration of Forbidden, Anti Corruption Policies* (Othman & Thani, 2010). Lima (5) indikator ini memiliki dari tiga belas (13), pernyataan yang menjelaskan bagaimana tata kelola perusahaan yang dilakukan (Fauziah & Yudho J., 2013) (Sofyani et al., 2012). Secara lengkap *item* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1: Indeks *Islamic Social Reporting*
*Corporate Governance Theme***

1. Status Kepatuhan Syariah
2. Rincian Nama Komisaris dan Direksi
3. Profil Jajaran Komisaris dan Direksi
4. Rincian Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi
5. Pernyataan Menegenai Renumerasi Komisaris dan Direksi
6. Jumlah Pelaksanaan Rapat Komisaris dan Direksi

7. Rincian Nama Dewan Pengawas Syariah
8. Profil Dewan Pengawas Syariah
9. Rincian Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
10. Pernyataan Mengenai Renumerasi Dewan Pengawas Syariah
11. Jumlah Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah
12. Struktur Kepemilikan Saham
13. Kebijakan Anti Korupsi

Sumber: Sumber : Diadopsi dari (Othman & Thani, 2010) (Sofyani et al., 2012) (Fauziah & Yudho J., 2013)

Metode skoring berdasarkan ISR indeks pada *Corporate Governace Theme* dikembangkan sehingga berisi 13 item pernyataan. Dimana nilai “0” untuk setiap item yang tidak diungkapkan dan nilai “1” untuk setiap item yang diungkapkan (Othman & Thani, 2010). Berikut rumus untuk menghitung besarnya *disclosure level* setelah *scoring* pada indeks ISR selesai dilakukan (Lestari, 2013) (Harahap et al., 2017):

$$\text{Disclosure Level} : \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

Bank Umum Syariah

Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan *funding*, *financing* dan *service* berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21 Perbankan Syariah, 2008). Jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan badan pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2016). Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional (Djumhana, 2008). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Muthaher, 2012).

Pengembangan Hipotesis

Dewan komisaris bertugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan agar sesuai dengan visi misi perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, maka dewan komisaris dapat meningkatkan terkait transparansi laporan manajemen. Ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia (Khoirudin, 2013) (Sudana & Arlindania W, 2011) (Nurkhin, 2010). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Charles & Chariri, 2012) (Lestari, 2013).

H_1 = Terdapat pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat terkait dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan direksi memiliki menentukan arah dan kebijakan strategis perusahaan serta bertanggungjawab penuh atas jalannya perusahaan. Ukuran dewan direksi salah komponen yang dinilai dalam GCG yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan, sehingga dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (Sukandar & Rahardja, 2014) (Wulandari & Budiarta, 2014) (Aprianingsih & Yushita, 2016). Jumlah anggota dewan direksi menentukan perencanaan kebijakan yang lebih komprehensif serta transparansi dalam pengungkapan tanggungjawab manajemen (Sudaryati & Eskadewi, 2012) (Ahzar & Trisnawati, 2013).

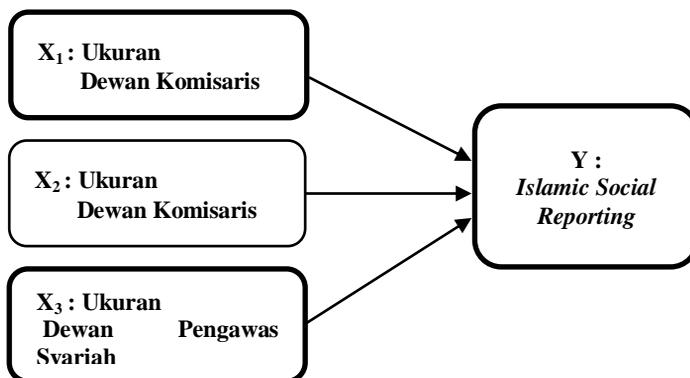
H_2 = Terdapat pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi tersebut antara lain mengawasi kegiatan penyaluran dana sosial termasuk bentuk ISR perusahaan (Harahap et al., 2017). DPS diharapkan memainkan peran untuk mewajibkan aktivitas sosial dan juga pengungkapan tanggungjawab sosial. Dengan demikian disimpulkan bahwa keberadaan DPS akan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial dengan lebih baik, sehingga adanya DPS berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Sudaryati & Eskadewi, 2012) (Charles & Chariri, 2012).

H_3 = Terdapat pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah.

Kerangka Berpikir

Penerapan *good corporate governance* menggunakan indikator ukuran dewan komisaris, ukuran direksi dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel independen. Sedangkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) menggunakan item *Corporate Governace* sebagai variabel dependen. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Menurut metodenya, Jenis penelitian ini merupakan metode kuantitatif asosiatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya (Suliyanto, 2018). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report* dan laporan GCG tahunan bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2019.

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah, pada Agustus 2020 jumlah BUS sebanyak empat belas (14) Bank. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Namun, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel. Penentuan sampel yang digunakan dengan kriteria sebagai berikut: Bank Umum Syariah (BUS) yang menerbitkan annual report secara rutin sepanjang tahun 2014-2019, telah beroperasi lebih dari lima tahun, dan memiliki total asset antara 5 sampai 10 Triliun. Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria tersebut berjumlah 7 (tujuh) meliputi: PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Skoring Berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR)

Tabel 2 menunjukkan hasil skoring aspek *Corporate Governance Theme* dengan indeks ISR, terdapat 13 item pernyataan lihat kembali Tabel 1. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa Bank Panin Dubai Syariah (Bank Panin Dubai Syariah, 2019) dan Bank Mega Syariah memiliki rata-rata tingkat pengungkapan tertinggi yaitu sebesar 84,6% (PT. Bank Mega Syariah, 2019) selama periode pengamatan dari tahun 2014 hingga 2019. Tingkat pengungkapan lainnya disusul oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 80,8% (PT. Bank Syariah Mandiri, 2019), Bank Bukopin Syariah sebesar 79,7% (Bank Syariah Bukopin, 2019), BNI Syariah sebesar 78,2% (PT. BNI Syariah, 2019), BRI Syariah sebesar 76,9% (PT. BRI Syariah, 2019) dan terakhir Bank Aceh Syariah sebesar 73,1% (Bank Aceh Syariah, 2019).

Tabel 2: Hasil Skoring ISR *Corporate Governance Theme* BUS

Kode	Nama BUS	Tahun						∑ 2014-2019 (%)
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
BSM	Bank Syariah Mandiri	84,6	76,9	76,9	76,9	84,6	84,6	80,8
BNIS	BNI Syariah	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	84,6	78,2
BRIS	BRI Syariah	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
BAS	Bank Aceh Syariah	53,8	84,6	76,9	69,2	76,9	76,9	73,1
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6
BMS	Bank Mega Syariah	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6
BBP	Bank Bukopin Syariah	69,2	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	79,7

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dimengerti, yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2013). Uji Statistik Deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
UKOMISARIS	42	3	6	3,83
UDIREKTUR	42	3	8	4,43
UDPS	42	2	5	2,33
ISR	42	53,8	84,6	80,0167
Valid N (listwise)	42			

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2020

Dari Tabel 3 diatas menunjukkan jumlah data sebanyak 42, adapun penjelasannya sebagai berikut: Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 3 nilai maksimum 6 dan rata-rata 3.83. Jumlah dewan komisaris dari 7 sampel penelitian, BUS minimal memiliki 3 dewan komisaris dan maksimal 6 dewan komisaris. Variabel Direksi nilai minimal 3 dan maksimal 8, artinya dari 7 sampel penelitian, BUS memiliki minimal 3 dewan direksi dan maksimal 8 dewan direksi. Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum 2 danmaksimum 5, artinya dari 7 sampel penelitian, BUS memiliki minimal 2 orang DPS dan maksimal 5 orang DPS. Indeks *Islami Social Reporting* (ISR), tingkat pengungkapan minimum sebesar 53,8% dan nilai maksimum sebesar 84,6%.

Uji Asumsi Klasik

Kesimpulan hasil uji ssumsi klasik pada Tabel 4, uji normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas model regresi yang

terbentuk tidak mengalami gejala multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan hasil uji autokorelasi, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam Uji Durbin-Watson, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Tabel 4: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Ket.	Hasil	Kesimpulan
Uji Normalitas – Uji K-S	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,100 > dari 0,05	Data terdistribusi Normal
Uji Multikolinieritas – Nilai Variance Inflation Factor (VIF)	Nilai VIF (Ukomisaris), (Udireksi), dan (UDPS)	1,681 < 10 1,505 < 10 1,306 < 10	Model regresi yang terbentuk tidak mengalami gejala Multikolinieritas
Uji Heterokedisitas – Uji Glejser	Hasil ABS_RES dengan nilai Sig. (Ukomisaris), (Udireksi) dan (UDPS)	0,468 > 0,05 0,441 > 0,05 0,298 > 0,05	Model regresi yang terbentuk tidak mengalami gejala Heterokedisitas
Uji Autokorelasi – Uji Durbin – Watson	Nilai Durbin-Watson	1,930 - Terletak diantara dU dengan 4dU	Model regresi yang terbentuk tidak mengalami masalah Autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2020

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji signifikansi parsial (Uji t), berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa: *Hipotesis pertama*: Variabel Ukuran Dewan Komisaris (X_1), nilai signifikansi (Sig.) adalah sebesar $0,883 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Artinya tidak ada

pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah. *Hipotesis kedua*: Variabel Ukuran Dewan Direksi (X_2), diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,039 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Artinya ada pengaruh Ukuran Dewan Direksi (X_2) terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah. *Hipotesis ketiga*: Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X_3), nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,040 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga juga diterima. Artinya ada pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X_3) terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah.

Tabel 5: Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,831	0,048		17,325	0
1 UKOMISARIS	-0,002	0,014	-0,028	-0,148	0,883
UDIREKTUR	-0,023	0,011	-0,386	-2,139	0,039
UDPS	0,034	0,016	0,356	2,122	0,04

a. Dependent Variable: ISR

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2020.

Berdasarkan hasil Uji F pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikan (Sig.) sebesar $0,054 > 0,050$ artinya variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan dewan pengawas syariah secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 6: Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,028	3	0,009	2,783	,054 ^b
1 Residual	0,127	38	0,003		
Total	0,155	41			

a. Dependent Variable: ISR

b. Predictors: (Constant), UDPS, UDIREKTUR, UKOMISARIS

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan bahwa *R Square* adalah 0,180. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah, dalam menjelaskan variabel independen hanya sebesar 18% sisanya sebesar 82% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

Tabel 7: Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424 ^a	0,18	0,115	0,05774

a. Predictors: (Constant), UDPS, UDIREKTUR, UKOMISARIS

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2020

Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 5, maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,831 + (-0,002) X_1 + (-0,023) X_2 + 0,034 X_3 + e$$

Persamaan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konstanta pada persamaan di atas diperoleh sebesar 0,831 berarti jumlah ISR pada 7 Bank Umum Syariah (BUS) sepanjang periode

2014-2019 sebesar 0,831. (2) Koefisien regresi variabel dewan komisaris diperoleh -0,002 dengan arah koefisien negatif. Hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 1% jumlah dewan komisaris, maka tingkat ISR 7 BUS tersebut akan mengalami penurunan sebesar 0,002 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. (3) Koefisien regresi variabel dewan direksi diperoleh -0,023 dengan arah koefisien negatif. Hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 1% jumlah dewan direksi, maka tingkat ISR 7 BUS tersebut akan mengalami penurunan sebesar 0,023 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. (4) Sedangkan, Koefisien regresi variabel dewan pengawas syariah diperoleh 0,034 dengan arah koefisien positif, hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 1% jumlah dewan pengawas syariah, maka tingkat ISR 7 BUS tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 0,034 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Ukuran Dewan Komisaris dan ISR

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa, ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dengan pendekatan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada tujuh (7) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2014-2019. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu, bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Rivandi & Marlina, 2019) (Aprianingsih & Yushita, 2016) (Sukandar & Rahardja, 2014) (Wulandari & Budiarta, 2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dewan komisaris tidak berdampak kepada kinerja bank, artinya tugas dan tanggungjawab

belum maksimal (Aprianingsih & Yushita, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dewan Komisaris dalam pelaksanaan, mengawasi, serta pelaporan tanggungjawab sosial bank syariah belum maksimal (Assegaf et al., 2012). Dewan Komisaris melakukan pengawasan bersifat lebih umum, artinya prinsip-prinsip syariah yang ada di bank syariah belum menjadi perhatian dalam pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Ukuran Dewan Direksi dan ISR

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa, ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dengan pendekatan ISR pada tujuh (7) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2014-2019. Hasil penelitian sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menunjukkan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Othman et al., 2009) (Sudana & Arlindania W, 2011) (Nurkhin, 2010) (Sudaryati & Eskadewi, 2012) . Dewan direksi melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan (Aprianingsih & Yushita, 2016). Jumlah direksi yang banyak disesuaikan dalam bagian-bagian tertentu yang dikuasai oleh setiap manajer, sehingga direksi lebih fokus untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Sukandar & Rahardja, 2014). Jumlah dewan direksi pada bank umum syariah berdampak pada pembagian tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan kebijakan bank, termasuk didalamnya pengungkapan tanggungjawab sosial.

Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ISR

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa, ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dengan pendekatan ISR pada tujuh (7) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2014-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu, bahwa adanya DPS sebagai pengawas mendampingi dewan komisaris dalam memantau aktivitas bank agar sesuai prinsip syariah. Jumlah DPS membuat pengungkapan dalam laporan dan aktivitas sosial semakin baik (Othman & Thani, 2010) (Sudaryati & Eskadewi, 2012) (Charles & Chariri, 2012) (Khoirudin, 2013). DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah, karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Dalam hal ini mengawasi kegiatan menyalurkan dana sosial yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan (Khoirudin, 2013). Jumlah DPS yang memadai membantu bank syariah untuk meningkatkan *shariah compliance* dalam pengungkapan tanggungjawab sosial.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dengan pendekatan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah. Sedangkan, ukuran Dewan Direksi dan ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dengan pendekatan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah. Secara simultan ketiga variabel tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggungjawab sosial dengan metode ISR pada Bank Umum Syariah.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa R *Square* sebesar 0,180 atau 18%, hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel hasil Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, dalam menjelaskan variabel independen hanya sebesar 18% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua rekomendasi kebijakan yang penulis ajukan bagi Bank Umum Syariah, yaitu (1) Tugas dan tanggungjawan Dewan Komisaris masih bersifat umum dalam proses pengawasan di Bank Umum Syariah. Peningkatan jumlah dewan komisaris diperlukan, agar fungsi pengawasan bisa lebih maksimal terlaksana. (2) Bank Umum Syariah dapat menggunakan indikator Islamic Social Reporting dalam memaksimalkan fungsi dan tugas Dewan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung hal tersebut perlu ditingkatkan jumlah Direksi dan DPS yang kompeten dan handal sehingga pengungkapan tanggungjawab sosial yang berbasis sharia compliance dapat berjalan dengan baik sesuai visi dan misi perusahaan.

REFERENSI

Aprianingsih, A., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Profita*, 4.

- Assegaf, Y. U., Falikhatun, & Wahyuni, S. (2012). Bank Syariah di Indonesia: Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure). *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*, 1(1), 255–267.
- Ahzar, F. A., & Trisnawati, R. (2013). Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall 2013*, 477–483.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. www.bi.co.id
- Charles, & Chariri. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Asia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1–15.
- Djumhana, M. (2008). *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fauziah, K., & Yudho J., P. (2013). Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 12–20.
- Harahap, N., Harmain, H., Siregar, S., & Maharani, N. (2017). Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR), Umur Perusahaan dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2010-2014. *Jurnal Kitabah*, 1(1), 69–91.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227–232.

- Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate Governance, Investor Protection, and Performance In Emerging Markets. *Journal of Corporate Finance*, 10(5), 703–728.
- Lestari, P. (2013). Determinants Of Islamic Social Reporting In Syariah Banks: Case Of Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(10), 28–34.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. *Accounting Foundation, The University of Sydney.*, 42(2), 266–289. <https://doi.org/doi: 10.1111/j.1468-4497.2006.00200.x>
- Muthafer, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu.
- Nurkhin, A. (2010). Corporate Governance Dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 46–55.
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research*, 9(4), 135–144.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12, 4–20.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. www.ojk.co.id
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. www.ojk.co.id
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*. www.ojk.co.id

- PT. Bank Aceh Syariah. (2019). *Laporan Tahunan PT. Bank Aceh Syariah Syariah Periode 2014-2019*.
- PT. Bank Mega Syariah. (2019). *Laporan Tahunan PT. Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2014-2019*. http://www.megasyariah.co.id/Annual_Report.php
- PT. Bank Syariah Bukopin. (2019). *Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2019*. <http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/9/0>.
- PT. Bank Syariah Mandiri. (2019). *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2019* (Annual Report No. 2014–2019). PT. Bank Syariah Mandiri.
- PT. BNI Syariah. (2019). *Laporan Tahunan BNI Syariah Periode 2014-2019* [Annual Report].
- PT. BRI Syariah. (2019). *Laporan Tahunan Bank BRI Syariah Periode 2014-2019*. <http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan>.
- Rivandi, M., & Marlina. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dalam Memprediksi Biaya Ekuitas Dengan Pendekatan Model Ohlson. *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(2), 222–244. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1751>
- Rizal, F., & Rofiqo, A. (2020). Determinants of Sharia Banking Profitability: Empirical Studies in Indonesia 2011-2020. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 137–161. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2051>
- Sofyani, H., Ulum, I., Syam, D., & Wahjuni L, S. (2012). Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 36–46.
- Sudana, I. M., & Arlindania W, P. A. (2011). Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 4(1), 37–49.

- Sudaryati, D., & Eskadewi, Y. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*, 11(1), 14–28.
- Sukandar, P. P., & Rahardja. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–7.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (17th ed.). Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis, dan Desertasi* (Edisi 1). Penerbit ANDI.
- Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. CAPS.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.
- Suwarjeni, V. W. (2015). *Metodologi Peneletian Bisnis dan Ekonomi* (1st ed.). Pustaka Baru Press.
- Tangkilisan, H. Nogi. S. (2003). *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Balaiurang.
- UU No. 21 Perbankan Syariah, M. H. & H. (2008). *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Negara.
- UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Zarkasyi, Moh. W. (2008). *Good Corporate Governance pada usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*. Alfabeta.
- Tapanjeh, A. M. A. (2009). *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles*.

Critical Perspectives on Accounting, 20, 556–567.
<https://doi.org/doi:10.1016/j.cpa.2007.12.004>

Wulandari, N. P. Y., & Budiarta, K. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3), 574–586.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.